

INTISARI

PERAN PEMERINTAH DALAM PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM)

(Studi Peran Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Dalam Pemberdayaan Sedotan Bambu Di Desa Ngringo Kabupaten Karanganyar)

Oleh

Cristian Septi Saputri, Dr. Winarti, M.Si, Joko Pramono, S.Sos, M.Si
Mahasiswa Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Slamet Riyadi Surakarta

Cristiansepti7@gmail.com

Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan peran pemerintah dalam memberdayakan usaha mikro kecil dan menengah yang ada di Karanganyar, salah satunya ialah usaha sedotan bambu di Desa Ngringo. Saat ini, persoalan yang dihadapi oleh usaha mikro kecil dan menengah yaitu penyediaan sarana dan prasarana yang terbatas, akses permodalan yang lemah, permasalahan perijinan usaha, keterbatasan pemasaran hingga pemanfaatan teknologi yang belum maksimal. Kehadiran UMKM bukan saja dalam rangka meningkatkan pendapatan tetapi juga untuk pemerataan pendapatan, sehingga inovasi usaha sedotan bambu ini dapat lebih berkembang menjadi sebuah “*brand*” lokal dan mampu menyediakan lapangan kerja yang baru. Oleh sebab itu peran pemerintah sangat dibutuhkan dalam memberikan pemberdayaan.

Penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yang melibatkan Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Pemerintah Desa Ngringo dan Pemilik UMKM sedotan bambu sebagai informan dengan menggunakan teknik wawancara, dokumentasi dan observasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran pemerintah dalam pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah menggunakan teori Gede Diva (2009:15), yaitu sebagai fasilitator regulator dan katalisator belum berjalan dengan baik dalam mengembangkan usaha sedotan bambu.

Kata Kunci : Peran, Pemberdayaan, Fasilitator, Regulator, Katalisator

Pendahuluan

Plastik menjadi salah satu jenis sampah yang sering digunakan oleh masyarakat. Namun penggunaan sampah plastik yang berlebihan dapat memberikan dampak yang besar, karena penguraian sampah tersebut membutuhkan waktu yang sangat lama yaitu puluhan hingga ratusan tahun. Upaya yang sedang dilakukan pemerintah Indonesia ialah meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pengurangan penggunaan sampah plastik, salah satunya mengganti pemakaian sedotan plastik. Maka, muncul berbagai alternatif sedotan ramah lingkungan yang memiliki potensi usaha, yang termasuk upaya penyelenggaraan pembangunan ekonomi masyarakat, salah satunya melalui pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (yang selanjutnya disebut UMKM).

Salah satu daerah yang saat ini sedang meningkatkan potensi umkm ialah Kabupaten Karanganyar. UMKM di Karanganyar saat ini sedang mengalami pasang surut. Bahkan hampir 10 persen dari jumlah UMKM mengalami mati suri, lantaran adanya kendala-kendala yaitu keterbatasan modal (www.solopos.com diakses pada tanggal 22 Februari 2020) dan kesulitan dalam pemasaran produk. Selain itu, minimnya pengetahuan tentang teknologi hingga penyediaan bahan baku yang terbatas. (www.jateng.tribunnews.com diakses pada tanggal 22 Februari 2020).

Seperti yang diketahui, Desa Ngringo merupakan salah satu desa yang ada di Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar, dimana desa tersebut memiliki beberapa UMKM yang sedang berkembang. Berdasarkan data tahun 2019 yang ada di Kantor Kepala Desa Ngringo, menyatakan bahwa jumlah sektor usaha mikro kecil dan menengah (mulai dari sektor jasa hingga perdagangan) yaitu berjumlah ±4.405 unit usaha. Salah satu usaha yang memiliki produk potensial di Desa Ngringo ialah usaha pembuatan sedotan bambu. Sedotan bambu adalah sebuah sedotan yang berbahan dasar alami guna mengurangi penggunaan sedotan plastik. Adanya usaha ini, memberi kesempatan dalam menyediakan lapangan kerja bagi masyarakat lokal.

Kendala UMKM sedotan bambu adalah penyediaan sarana dan prasarana yang terbatas hingga akses permodalan yang masih lemah. Ketika permintaan sedotan bambu meningkat, bahan baku yang dibutuhkan juga meningkat bahkan hingga memasok bambu dari luar daerah seperti Pasuruan, Kediri, Trenggalek, Temanggung dan lain sebagainya. Dengan terbatasnya bahan baku bambu dan peralatan yang ada membuat produksi sedotan bambu sedikit terhambat. Selanjutnya, Gede Diva (2009:15) mengemukakan bahwa peran pemerintah yang efektif dalam pengembangan usaha mikro, kecil

dan menengah dapat dilihat dari bagaimana peran pemerintah berperan sebagai fasilitator, regulator dan katalisator. Para pelaku usaha juga memiliki hak untuk mendapatkan pendampingan, pembinaan hingga pelatihan yang berkaitan dengan pengembangan usahanya (sesuai pasal 8 Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2017 Kabupaten Karanganyar), termasuk usaha sedotan bambu yang saat ini masih minim perhatian dari pemerintah. Berdasarkan penjelasan diatas menimbulkan pertanyaan sejauh mana peran pemerintah Kabupaten Karanganyar untuk memberdayakan UMKM sedotan bambu.

Metode Penelitian

Jenis Penelitian

Penelitian tentang Peran Pemerintah Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) (Studi Peran Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Dalam Pemberdayaan Sedotan Bambu Di Desa Ngringo Kabupaten Karanganyar) menggunakan penelitian deskriptif kualitatif.

Objek/Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Karanganyar. Selain itu, penelitian juga dilakukan di Kantor

Kepala Desa Ngringo sekaligus tempat usaha sedotan bambu milik bapak Joko Prayitno yang berlokasi di Desa Ngringo.

Teknik Penentuan Informan

Penentuan informan pada penelitian ini ialah dengan menggunakan teknik *purposive sampling* yaitu teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan ini misal orang atau penguasa yang dianggap paling tahu mengenai apa yang diharapkan dalam memudahkan peneliti menjelajahi objek yang akan diteliti. Dimana pemilihan dilakukan secara sengaja berdasarkan kriteria yang telah ditentukan atau ditetapkan guna memenuhi tujuan penelitian. Adapun informan dalam penelitian ini ialah Kepala Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah di Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perangkat Desa Ngringo yang ada di Kantor Kepala Desa Ngringo serta bapak Joko Prayitno sebagai pelaku usaha sedotan bambu.

Pembahasan

Dalam melakukan usaha pemberdayaan, Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Karanganyar terhadap UMKM sedotan bambu di Desa Ngringo yang melalui peran sebagai fasilitator, regulator dan katalisator.

a. Peran Pemerintah Sebagai Fasilitator

Tugas seorang fasilitator ialah memberikan kemampuan dengan berbagai cara, seperti memberikan bantuan peralatan, pelatihan usaha hingga melaksanakan seminar atau workshop.

1) Pemberian bantuan peralatan

Peran pemerintah sebagai fasilitator ialah memberi bantuan terhadap UMKM. Akan tetapi, masih terdapat kendala dimana program bantuan yang saat ini sedang berjalan belum menjangkau seluruh industri kecil. Selain karena anggaran dan jumlah peralatan yang terbatas, semua usaha yang menerima bantuan peralatan harus berbadan hukum terlebih dahulu (sesuai Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian). Dan saat ini, pemerintah Kabupaten Karanganyar baru fokus pada lima sektor seperti *chemical* (kimia), *electronic* (elektronik), *automotive* (otomotif), *textile and apparel* (tekstil dan pakaian), dan *food and beverage* (makanan dan minuman) yang secara tidak langsung umkm lain sedikit dipersulit untuk menerima bantuan tersebut. Bantuan peralatan yang telah diberikan oleh Disdagnakerkop UKM Karanganyar yaitu pengrajin batik, pengusaha roti, dan sebagainya. Namun sayangnya, bantuan untuk usaha sedotan bambu belum ada dan masih mengharapkan adanya bantuan dari pemerintah

untuk menunjang kegiatan produksi mereka. Karena ketika permintaan sedang meningkat, kadang masih keteteran dalam pengerjaannya.

2) Pelaksanaan pelatihan usaha

Peran pemerintah sebagai fasilitator adalah memberikan pelatihan terhadap Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Program ini dilakukan untuk meningkatkan kemampuan UMKM guna memajukan usahanya. Agar pelatihan yang diberikan tepat sasaran, Pemerintah juga menerima usulan dari para pemilik usaha sesuai dengan kebutuhan usahanya. Pelatihan tersebut tidak dikhususkan untuk pengrajin saja, tetapi masyarakat yang berminat juga dapat mengikuti pelatihan. Adapun pelatihan yang dilakukan oleh pemerintah seperti bisnis online yang membantu usaha sedotan bambu dalam memasarkan produknya menggunakan media sosial. Melalui media itulah peminat sedotan bambu semakin bertambah, tidak hanya dari dalam kota akan tetapi juga dari luar kota. Syarat untuk mengikuti pelatihan sangat mudah yaitu cukup mendaftar ke Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, mempunyai KTP domisili Karanganyar, dan mengisi formulir yang ada. Dalam pelaksanaannya Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah bekerjasama dengan pihak yang lebih paham sesuai dengan bidangnya agar para pelaku

usaha lebih cepat dalam memahami dan meningkatkan kemampuannya.

3) Penyelenggaraan Seminar atau Workshop

Peran Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah sebagai fasilitator adalah menyelenggarakan seminar atau workshop, karena saat ini semua usaha dituntut untuk kreatif dan inovatif ditengah kondisi perekonomian yang belum stabil. Dengan diselenggarakannya kegiatan tersebut akan sangat bermanfaat bagi industri kecil dan menengah termasuk usaha sedotan bambu dalam meningkatkan pengetahuan dan kreatifitas mulai dari pengemasan yang menarik, pemasaran melalui pemanfaatan teknologi di era digitas seperti sekarang untuk meningkatkan daya saing. Seminar atau workshop yang telah dilaksanakan oleh Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah salah satunya yaitu Seminar dengan tema UMKM dalam menghadapi revolusi industri 4.0 yang dilaksanakan di Gedung Wanita Karanganyar, acara Galang UKM Indonesia menuju UKM Brilian yang diselenggarakan di pendopo rumah dinas bupati Karanganyar. Dalam penyelenggaraan seminar atau workshop tersebut, pemerintah Kabupaten Karanganyar menggandeng pihak lain, dimana para pegiat umkm juga memiliki peluang untuk bertemu dengan

pengusaha-pengusaha besar yang bisa diajak bekerja sama.

b. Peran Pemerintah Sebagai Regulator

Membuat kebijakan-kebijakan yang dapat mempermudah UMKM dalam mengembangkan usahanya menjadi peran regulator dari pemerintah., selain itu juga menjalankan kegiatan pengembangan sesuai dengan tupoksi yang ada dan berdasarkan Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil dan menengah.

Program atau kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah mempunyai tugas, fungsi dan wewenang yang sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pemberdayaan Usaha Mikro. Namun sedikit kendala terjadi pada pelaksanaan pemberian bantuan, yaitu menurut aturan yang ada, semua industri yang menerima bantuan peralatan harus berbadan hukum. Sedotan bambu milik Bapak Prayitno sendiri juga belum mendaftarkan ijin usahanya dikarenakan seringnya bergonta-ganti usaha mulai dari mainan anak-anak, menjual permen lolipop dan lain-lain sehingga belum bisa mengajukan bantuan kepada pemerintah. Adanya peraturan tersebut tidak membatasi ruang gerak umkm dalam memajukan usaha

mereka tetapi malah menguntungkan. Dengan memiliki ijin usaha, pelaku umkm berhak mendapatkan akses permodalan, perlindungan hukum hingga memperoleh bimbingan melalui program-program pemerintah terkait pengembangan usaha.

c. Peran Pemerintah Sebagai Katalisator

Perannya sebagai katalisator yaitu pemerintah dapat berperan sebagai stimulan untuk mempercepat proses perkembangan UMKM. Pemerintah dapat mengambil beberapa langkah seperti menyediakan informasi permodalan bagi UMKM dan membuka ruang promosi produk lokal secara meluas.

1) Permodalan

Selain sarana dan prasarana, permodalan juga merupakan hal yang harus diperhatikan oleh pemerintah, karena untuk memulai suatu usaha tentunya membutuhkan suatu modal. melalui perkuatan modal, maka dapat mendukung proses berkembangnya suatu usaha. Tetapi dalam hal ini dinas tidak bisa memberikan bantuan modal secara langsung berupa uang tunai. Pemerintah hanya menyediakan permodalan dengan cara bekerjasama dengan perbankan dan lembaga-lembaga keuangan. Dan dalam mengakses bantuan permodalan ada syarat yang harus dipenuhi yaitu mempunyai surat izin usaha, Namun kenyataannya, usaha sedotan bambu juga belum

mendaftarkan usahanya sehingga mereka masih menggunakan modal sendiri untuk menjalankan usahanya.

2) Ruang Promosi Produk

Penyelenggaraan promosi produk-produk UMKM menjadi suatu hal yang sangat bermanfaat bagi pelaku usaha industri kecil maupun menengah. Promosi menjadi salah satu kegiatan yang harus dilakukan dan bertujuan untuk menarik perhatian pelanggan agar tertarik untuk membeli produk tersebut. Dalam memperkenalkan dan memasarkan produk UMKM, Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Karanganyar dan Pemerintah Desa Ngringo menyelenggarakan pameran. Dengan adanya pameran, diharapkan para pelaku industri kecil dan menengah semakin aktif dan inovatif dalam mengembangkan produk unggulan mereka. Akan tetapi, karena pameran dirasa masih kurang untuk mempromosikan produk, para pelaku usaha juga memilih menjual produk mereka ke tengkulak dan media sosial. Harga sedotan bambu ini sangat terjangkau mulai dari tiga ribu rupiah tergantung dari ukurannya. Semakin kecil ukurannya, maka semakin mahal. Sedotan bambu ini bisa dipakai berulang kali tetapi tidak selamanya, yaitu 5 hingga 10 kali pemakaian saja.

Kesimpulan

a. Peran Pemerintah Sebagai Fasilitator

1) Pemberian bantuan peralatan

Saat ini bantuan peralatan untuk usaha sedotan bambu belum ada, selain karena anggaran dan jumlah peralatan yang terbatas, semua usaha yang menerima bantuan peralatan harus berbadan hukum terlebih dahulu. Dan saat ini, pemerintah Kabupaten Karanganyar baru fokus pada lima sektor seperti kimia, elektronik, otomotif, tekstil dan pakaian, dan makanan/minuman yang secara tidak langsung umkm lain sedikit dipersulit untuk menerima bantuan tersebut. Namun, pemerintah masih mengusahakan memberi bantuan terhadap sedotan bambu dan baru mengikutsertakan seminar.

2) Pelaksanaan pelatihan usaha

Pelatihan bisnis online yang dilakukan oleh pemerintah membantu usaha sedotan bambu dalam memasarkan produknya menggunakan media sosial. Dalam pelaksanaannya Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah bekerjasama dengan pihak yang lebih paham sesuai dengan bidangnya agar para pelaku usaha lebih cepat dalam memahami dan meningkatkan kemampuannya. Melalui media sosial, peminat sedotan bambu semakin bertambah, tidak hanya dari dalam kota akan tetapi juga dari luar kota. Syarat untuk mengikuti pelatihan sangat mudah yaitu cukup mendaftar ke

dinas, mempunyai KTP domisili Karanganyar, dan mengisi formulir yang ada.

3) Penyelenggaraan Seminar atau Workshop

Ditengah kondisi perekonomian yang belum stabil, diselenggarakannya kegiatan seminar memberikan manfaat bagi industri kecil dan menengah termasuk usaha sedotan bambu dalam meningkatkan pengetahuan dan kreatifitas mulai dari pengemasan yang menarik, melakukan pemasaran menggunakan digitalisasi untuk meningkatkan daya saing. Seminar atau workshop yang telah dilaksanakan oleh Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah salah satunya yaitu Seminar dengan tema UMKM dalam menghadapi revolusi industri 4.0, acara Galang UKM Indonesia menuju UKM Brilian. Dalam penyelenggaraan seminar atau workshop tersebut, pemerintah Kabupaten Karanganyar menggandeng pihak lain.

b. Peran Pemerintah Sebagai Regulator

Dalam pelaksanaan program atau kegiatannya, Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah mempunyai tugas, fungsi dan wewenang sesuai Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2017 sekaligus perwujudan dari Undang Undang Nomor 20 Tahun 2008. Namun kendala yang terjadi yaitu menurut aturan yang ada, semua industri yang menerima

bantuan peralatan harus berbadan hukum. Sedangkan sedotan bambu milik Bapak Prayitno ini belum memiliki surat ijin usaha karena seringnya berganti jenis usaha (mulai dari mainan anak-anak hingga permen lolipop) sehingga belum bisa mengajukan bantuan kepada pemerintah.

c. Peran Pemerintah Sebagai Katalisator

1) Permodalan

Saat ini, usaha sedotan bambu masih menggunakan modal sendiri untuk menjalankan usahanya. Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah tidak bisa memberikan bantuan modal secara langsung berupa uang tunai, akan tetapi menggandeng pihak perbankan dan lembaga keuangan untuk memberikan bantuan pinjaman. Akan tetapi karena sedotan bambu belum mendaftarkan ijin usahanya maka hal tersebut belum bisa didapatkan, sedangkan salah satu syarat untuk mendapat bantuan permodalan (KUR) adalah memiliki ijin usaha.

2) Ruang Promosi Produk

Dalam memperkenalkan dan memasarkan produk UMKM, Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Karanganyar dan Pemerintah Desa Ngringo menyelenggarakan pameran salah satunya Ngringo expo 2019, yang juga diikuti oleh sedotan bambu ini. Selain pameran, para pelaku usaha

juga menjual produknya ke tengkulak dan media sosial. Harga sedotan bambu ini sangat terjangkau tergantung dari ukurannya. Sedotan bambu ini bisa dipakai berulang kali tetapi tidak selamanya, yaitu 5 hingga 10 kali pemakaian saja.

Daftar Pustaka

Adiwilaga R, Alfian Y dan Rusdia U. 2018. *Sistem Pemerintahan Indonesia*. Yogyakarta:Deepublish

Ambar Teguh Sulistyani, 2004, *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan*. Yogyakarta : Graha Ilmu.

Collier, William L , Santoso Kabul, Soentoro, Wibowo Rudi. 1996. *Pendekatan Baru Dalam Pembangunan Pedesaan di Jawa Kajian Pedesaan Selama Dua Puluh Lima Tahun*, Jakarta

Davey, Kenneth J. 1998. *Pembiayaan pemerintah daerah, Praktek-Praktek Internasional dan Relevansinya Bagi Dunia Kerja*. Jakarta:UI Press

Diva, Gede. 2009. *"Mengembangkan UKM Melalui Pemberdayaan Peran Pemerintah"*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama

H.B, Sutopo. 2002. *Pengantar Penelitian Kualitatif*. Surakarta:Universitas Sebelas Maret Press

Kuncoro, Mudrajad. 2004. *Otonomi & Pembangunan Daerah, Reformasi, Perencanaan, Strategi, dan Peluang*. Jakarta: Erlangga

Mardikanto, Totok dan Poerwoko Soebiato. 2013. *Pemberdayaan Masyarakat dalam Prespektif Kebijakan Publik*, Bandung : ALFABETA

Miles dan Huberman, 2014. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: Universitas Indonesia Press

Mubyarto. 2002. *Pemberdayaan Ekonomi Rakyat dan Peranan Ilmu-Ilmu Sosial*. Yogyakarta: Aditya Media

Sjaifudin, Hetifah. 1995. *Strategi dan Agenda Pengembangan Usaha Kecil*. Bandung: Yayasan Akgita

Soekanto, Soerjono. 2003. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada

Sugiyono. 2010. *Metode penelitian kuantitatif & kualitatif R&D*. Bandung: CV Alfabeta

Sugiyono. 2015. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV Alfabeta

Supriatna Tjahya. 2000. *Strategi Pembangunan dan Kemiskinan*. Jakarta: Rineka Cipta.

Thoha, Mifthah. 2003. *“Perilaku Organisasi; Konsep Dasar dan Aplikasinya.”* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

www.solopos.com di akses pada 22 Februari 2020 pukul 21.32

www.jateng.tribunnews.com di akses pada 22 Februari 2020 pukul 22.52